



I J A B

Indonesian Journal of Accounting and Business

ISSN. 2715-2561 (Print) - ISSN. 2715-257x (Online)
<http://ijab.ubb.ac.id/index.php/journal>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bangka Belitung

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunijk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: ijab.jurnal@gmail.com
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nurhayati¹, Nizwan Zuhkri², Devi Valeriani³

Universitas Bangka Belitung^{1,2,3}

nurhayatitz09@gmail.com

ABSTRAK

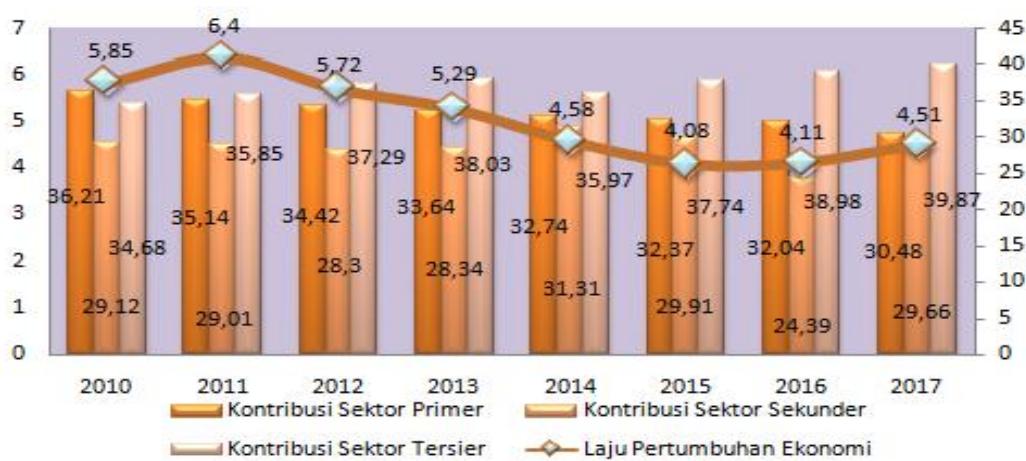
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kebebasan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari segi keuangan maupun kebijakan, hal tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik didukung dengan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang baik merupakan tujuan setiap daerah yang menerapkan otonomi daerah. Pembangunan fasilitas dan sarana prasarana tersebut didanai dari pendapatan daerah, sehingga semakin optimal penggalian sumber daya maka akan semakin baik. Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan PAD, DAU dan DAK serta pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan adalah deskriptif statistik dengan analisis rasio dan uji regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data realisasi PAD, DAU, DAK dan PDRB triwulan dari Tahun 2010-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengelolaan PAD sangat efektif, pengelolaan DAU dan DAK cukup efektif. Hasil pengujian regresi linear berganda secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simutan PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mengoptimalkan sumber pendapatan daerah terutama PAD sebaiknya dilakukan pemerintah daerah, mengingat kebutuhan fiskal untuk membiayai kebutuhan daerah terutama pelayanan publik semakin meningkat. Hal tersebut merupakan upaya perwujudan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Terwujudnya otonomi daerah yang mampu menggali sumber daya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengalokasikan pendapatan daerah guna menuju perekonomian. Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang kinerjanya secara langsung dinilai oleh masyarakat.

Analisis kinerja keuangan pemerintah dalam hal keuangan dapat dilihat dari kinerja keuangannya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap realisasi APBD yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan juga digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari PDRB ADHK menurut lapangan usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 sebesar 4,51 persen, keadaan tersebut masih lebih rendah dibandingkan *national economic growth* (pertumbuhan ekonomi nasional) yaitu 5,27 persen (yoY) dan pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,65 persen (BPS, 2019).



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka, BPS, 2019

Pertumbuhan ekonomi berfluktuatif, keadaan tertinggi terjadi pada Tahun 2011 sebesar 6,40 persen, dengan sektor tersier memiliki kontribusi terbesar 35,85 persen, 35,14 persen pada sektor primer dan 29,01 persen sektor sekunder. Kondisi terendah terjadi pada Tahun 2015 yang disebabkan menurunnya permintaan akan produk ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPS, 2019).

Penyediaan aset tetap berupa sarana prasarana dan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi baik. Pengalokasian anggaran belanja modal yang berasal APBD adalah sumber dana untuk pembangunan aset tetap tersebut. Sumber APBD menurut UU No. 33/2004 terdiri PAD, *balanced fund* dan lain-lain pendapatan yang sah. Setiap daerah memiliki kemampuan pendanaan yang berbeda sesuai kemampuan daerah merealisasikan dan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah (PAD) yang akan menciptakan dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Mengatasi ketimpangan fiskal dan infrastruktur di daerah, pemerintah mengeluarkan *balance fund* (dana perimbangan) yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Meskipun pemerintah mengeluarkan dana perimbangan, namun setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasala dari sumber ekonomi asli daerah (Halim & Kusufi, 2013). Sedangkan, menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD

merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sementara itu, menurut Julitawati, *et al* (2012), PAD didefinisikan sebagai sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena otoritas yang diberikan masyarakat dapat berupa pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan beberapa pengertian persepsi sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang dapat diukur dengan uang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan UU yang berlaku. Sumber PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dana Alokasi umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan dana yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi daerah karena merupakan transfer dana yang bersifat “*block grant*” (Halim, 2016). Pengalokasian DAU berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 adalah paling sedikit 26 persen dari penerimaan bersih dalam negeri. DAU daerah ditetapkan berdasarkan perimbangan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. DAU merupakan komponen *balance fund* pada APBN yang pengalokasianya *by formula* berdasarkan konsep alokasi dasar dan alokasi celah fiskal. DAU bertujuan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal horizontal antar daerah dan penggunaan dana sepenuhnya diserahkan kepada daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa program yang menjadi prioritas dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.

Pertumbuhan Ekonomi

Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Sebab para pengusaha yang mempunyai kemampuan dan keberanian menaplikasikan penemuan-penemuan baru, dalam aktivitas produksi. Sedangkan Harrod-Domar (penyempurnaan dari teori Schumpeter) memiliki pandangan bahwa pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal, yang memungkinkan peningkatan *output* (Rahardja & Manurung, 2008). Menurut Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat

bertambah. Beberapa hal yang harus diprioritaskan jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya melakukan pembangunan dan penyediaan fasilitas dan sarana prasarana publik yang akan mendorong investor lokal maupun asing berinvestasi, melakukan pemulihan lingkungan dan memperkuat sektor pertanian (Saad & Kalakech, 2009)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB tingkat regional adalah kemampuan daerah pada waktu tertentu untuk menciptakan nilai tambah barang/jasa (BPS, 2019). Sedangkan, menurut BI (2019), PDRB merupakan kapasitas *value* barang/jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi didapatkan melalui perhitungan PDRB ADHK.

Rasio Efektivitas

Efektivitas menurut Adisasmita (2011) merupakan derajat capaian keberhasilan suatu program yang hasilnya akan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pekei (2016) mengatakan efektivitas merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Analisis efektivitas dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan lalu dikali seratus yang berbentuk persentase. Rasio efektivitas mendeskripsikan tingkat kemampuan daerah untuk mewujudkan PAD yang telah direncanakan dibandingkan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai atas dasar potensi riil dari daerah (Faud, 2016).

III. METODE PENELITIAN

Tempat, Waktu dan Jenis Data Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia, selama sembilan bulan yaitu dari bulan Oktober 2018-Juni 2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa data realisasi PAD, DAU, DAK dan PDRB triwulan Tahun 2010-2017 sebanyak 32 data.

Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisa terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan dengan memberikan gambaran empirik (Ferdinand, 2014). Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan hasil perhitungan rasio efektivitas pengelolaan PAD, DAU dan DAK serta analisis regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan variabel bebas dengan terikat (Ghozali, 2016), yaitu pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

IV. HASIL DAN DISKUSI

Pengujian Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat rasio efektivitas PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami fluktuatif. Tahun 2010-2015 tingkat efektivitas masuk kategori sangat efektif karena realisasi yang diperoleh melebihi target yang telah

ditetapkan. Selanjutnya pada Tahun 2016 dan 2017 realisasi PAD tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan setiap tahunnya pada target penerimaan PAD meskipun realisasi yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Secara keseluruhan rata-rata efektifitas selama 8 tahun (2010-2017) yaitu sebesar 105,24 persen yang termasuk dalam kategori sangat efektif, artinya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mampu mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber PAD yaitu pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar pada PAD, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Rasio Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama delapan tahun anggaran berada pada tingkat rata-rata sebesar 99,90 persen yang dikategorikan cukup efektif. Keadaan tersebut disebabkan DAU merupakan komponen dari transfer umum, penggunaannya menurut UU No. 18/2016 diarahkan sekurang-kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan publik antardaerah. Akan tetapi, terkhusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung anggaran 25 persen tersebut dipergunakan untuk bagian kesehatan dan hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan keadaan tersebut mengakibatkan tingkat efektivitas yang tidak terealisasi dengan baik (efektif). Selama 8 tahun anggaran, keadaan yang mengalami tingkat efektivitas kurang efektif hanya terjadi pada Tahun 2010 dan 2017, selain itu efektivitas yang dicapai sudah efektif.

DAU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih banyak diperuntukkan pada gaji PNSD di lingkungan pemerintahan yang pengelolaannya sudah efektif. Hal tersebut dibuktikan dari jawaban dari kuesioner yang telah disebarluaskan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diambil sebagai sampel). Berdasarkan dari beberapa pertanyaan yang diajukan mengenai keadilan dalam penggajian, layak dan wajar, responden rata-rata menjawab setuju dari 2 kategori jawaban yang disediakan (1=Setuju, 2=Tidak Setuju).

Rasio Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio, dari Tahun 2010-2017 rasio efektivitas DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi fluktuatif dengan rata-rata selama 8 tahun anggaran adalah sebesar 91,56 persen yang masih termasuk dalam kategori cukup efektif. Keadaan tersebut dikarenakan ada beberapa kegiatan yang diajukan pemerintah melalui OPD teknis dari dinas terkait tidak terealisasi dengan baik sehingga dapat menurunkan nilai efektivitas DAK tersebut dan kegiatannya tidak berjalan lancar sesuai dengan juknis yang ditetapkan. Selain itu, selama 8 tahun anggaran, ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana meskipun dana dari pemerintah sudah dicairkan dikarenakan PAGU yang diajukan tidak sesuai dengan juknis yang ditetapkan yang berakibat kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Data awal yang diuji dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi masalah autokorelasi, untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti melakukan transformasi data dalam bentuk logaritma natural (LN) agar model regresi dapat digunakan. Setelah dilakukan transformasi data,

didapatkan variabel independen yaitu LN_PAD, LN_DAU dan LN_DAK sedangkan variabel dependen adalah LN_PE yang kemudian dilakukan pengujian kembali.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda, setelah dilakukan uji asumsi klasik ditemukan bahwa model regresi dapat digunakan.

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian parsial yang dilakukan, pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai beta sebesar 0,307 dengan nilai signifikansi 0,000 $< 0,05$, artinya PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan PAD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi. Hasil penelitian searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek & Badrudin (2016) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Arini & Mustika (2015) di Provinsi Bali dan penelitian oleh Gunantara & Dwirandra (2014) di Bali, yang menyatakan bahwa PAD memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar, Palar & Sumual (2016) di Kota Manado.

PAD dipergunakan untuk belanja daerah, semakin besar tingkat PAD yang diterima maka pemerintah memiliki inisiatif untuk lebih optimal menggali potensi daerah yang dimiliki dan menganggarkan belanja modal untuk pembangunan lebih besar. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai beta sebesar 0,094 persen dan nilai signifikansi 0,004 $< 0,05$ yang berarti DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siswiyanti (2015) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Uhise (2013) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara dan penelitian Mawarni, Darwanis & Abdullah (2013) pada Kabupaten/Kota di Aceh, bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, berlainan arah dengan penelitian Putri (2015) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta penelitian oleh Tahar & Zakhiya (2011) pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan.

Pengalokasian DAU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk pembayaran gaji PNSD dilingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dikhurasukan untuk belanja pembangunan sarana prasarana pelayanan publik agar tingkat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan DAU merupakan bagian dari dana transfer umum, dimana menurut UU No. 18/2016 paling sedikit 25 persen digunakan untuk untuk belanja infrastruktur daerah yang terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan publik antardaerah. Oleh karena itu, DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terkhusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, jika penerimaan DAU yang merupakan bagian dari dana transfer pemerintah daerah meningkat, maka hal tersebut akan meningkatkan rasio ketergantungan daerah terhadap pembiayaan pusat dan akan mengurangi tingkat kemandirian suatu daerah. DAU memiliki kontribusi yang besar pada dana perimbangan

dengan nilai rata-rata per tahun sebesar 67,30 persen. Namun, jika DAU dikelola dengan baik maka akan mendatangkan penerimaan baru.

Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji parsial, DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,010 dengan nilai signifikansi $0,166 > 0,05$ yang artinya bahwa DAK memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut searah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siagian & Djazari (2018) di D.I. Yogyakarta yang menyatakan terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Laloan, Laoh & Pakasi (2018) di Provinsi Sulawesi Utara.

Pencapaian hasil tersebut disebabkan DAK yang diterima pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipergunakan untuk kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Arah kegiatan DAK telah diatur oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. DAK sebagai bagian dari dana perimbangan memiliki dampak positif terhadap kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal tersebut terlihat dari proporsi DAK pada pendapatan dan belanja dalam APBD. Namun, manfaatnya kepada masyarakat dalam jangka pendek tidak bisa dirasakan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Saad & Kalakech (2009) yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan dalam jangka pendek namun berdampak positif dalam jangka panjang.

Arah kegiatan DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bidang infrastruktur jalan, irigasi, kesehatan pelayanan rujukan dan farmasi, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang keselamatan transoprtasi, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua kegiatan dapat terealisasi dengan baik efektif hanya terdapat beberapa kegiatan yang setiap tahunnya dapat terlaksana dengan baik yaitu infrastruktur jalan dan irigasi.

Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji signifikansi F, PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian & Djazari (2018) di D.I. Yogyakarta serta penelitian Maryati & Endrawati (2010) di Sumatera Barat yang menyatakan bahwa secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

V. KESIMPULAN

Tingkat efektivitas pengelolaan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2017 terlihat berfluktuatif namun mengalami perkembangan yang negatif yang mengarah kepada tingkatan yang kurang efektif. Namun, jika dirata-ratakan maka tingkat efektivitas selama 8 tahun tergolong sangat efektif meskipun dua tahun terakhir (2016 & 2017) terus mengalami penurunan. Pencapaian angka tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mampu mengoptimalkan penggalian potensi-potensi sumber daya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif dari Tahun 2010-2017, dimana pada Tahun 2010 kriterianya berada pada kriteria kurang efektif. Namun, keadaan tersebut

terus membaik dari Tahun 2011 hingga 2016 yang tergolong efektif capaiannya dan menurun lagi pada Tahun 2017. Rata-rata pencapaian efektivitas pengelolaan DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup efektif, hal ini dikarenakan tidak terealisasi secara penuh peruntukan DAU bagi kegiatan tertentu (peningkatan pelayanan publik) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Hasil perhitungan tingkat efektivitas DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurun waktu delapan tahun (2010-2017) mengarah kepada tingkat pencapaian yang cukup efektif sama halnya dengan rata-rata efektivitas DAK yang cukup efektif. Sebabnya ialah DAK yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan prioritas nasional, pengelolaannya telah cukup efektif digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik seperti jalan, pelayanan kesehatan dan layanan publik lainnya dengan tujuan untuk memicu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara PAD dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang artinya bahwa penerimaan PAD yang semakin meningkat dapat memicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebabnya adalah PAD dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat langsung sehingga sangat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat yang dampaknya terlihat pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara parsial yang mengindikasikan bahwa kenaikan DAU dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil ini didapatkan karena DAU yang dialokasikan untuk gaji PNSD dan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD dan masyarakat umum telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga dampaknya juga dapat dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Temuan penelitian bahwa DAK secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berarti bahwa peningkatan penerimaan DAK meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah namun memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan DAK yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik belum langsung terasa dampaknya pada masyarakat. Variabel PAD, DAU dan DAK dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 87,5 persen dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model dalam penelitian ini.

Pemerintah diharapkan dapat mengurangi tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah, salah satunya dengan mengurangi transfer pusat ke daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun efektivitas PAD rata-rata sudah tergolong sangat efektif, namun pemerintah tetap harus mengoptimalkan pendapatan daerah dalam bentuk PAD, baik dalam bentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Selain itu, untuk meningkatkan PAD yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah dapat memacu sektor penerimaan potensial dan membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai perwujudan

kemandirian fiskal. Pemerintah juga harus memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan pemungutan PAD agar dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan pengkajian dan studi kelayakan serta analisa investasi terhadap pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang didanai dari DAU dan DAK. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga DAU & DAK dapat dikelola sesuai penempatan bidangnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengambil sampel di kabupaten/kota yang dampak dari alokasi DAU dan DAK dapat dirasakan secara langsung atau membandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan atau kesamaan lainnya, menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta menambah periode penelitian sehingga hasilnya dapat lebih terlihat.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar, M. L., Palar, S. W. dan Sumual, J. I. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16, No. 02. Hal. 218-232.
- Arini dan Mutika, M. D. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali Tahun 2007-2013. *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 4, No. 9. Hal. 1140-1163.
- Faud, R. M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunantara, P. C. dan Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 7, No. 3. Hal. 529-546.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. dan Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Julitawati, E., Darwanis dan Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 1, No. 1, Hal: 15-29.
- Laloan, V., Laoh, O. E. H. dan Pakasi, C. B. D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

- pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*. Vol. 14, No. 1. hal.199-206.
- Manek, M. dan Badrudin, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*. Vo. 17, No. 2. Hal. 81-98.
- Maryati, U. dan Endrawati.(2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.Vol. 5, No. 2.
- Mawarni, Darwanis dan Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 2, No. 2. Hal. 80-90.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta: Penerbit Taushia.
- Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.Vol. 5, No. 2. Hal.173-186.
- Rahardja, P. dan Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Saad, W. dan Kamel Kalakech. (2009). The Nature of Government Expenditure and its Impact on Sustainable Economic Growth. *Middle Eastern Finance and Economics*. Vol. 1, No. 4, Hal: 39-47.
- Siagian, E. dan Djazari, M. (2018). Pengaruh PAD< DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016. *PROFITA: Kajian Ilmu Akuntansi*. Vol. 6, No. 8. Hal.1-12.
- Siswiyanti, P. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*. Vol. 7, No. 1. Hal.1-17.
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tahar, A. dan Zakhya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.Vol. 12, No. 1. Hal.88-99.
- Uhise, S. (2013). Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 4. Hal.1677-1686.
- Babel.bps.go.id
- Bi.go.id
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Undang - Undang Republik Indonesia.Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.